



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, yang menyatakan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang

- Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang yang bersifat perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan kepemiluan.
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, termasuk kategori pelayanan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 13 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG,

ttd.

EDY SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG  
NOMOR 15 TAHUN 2025  
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SINTANG

STANDAR PELAYANAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH MELALUI  
PENDIDIKAN KEPEMILUAN

| NO   | KOMPONEN                        | URAIAN |  |
|--|---------------------------------|--------|--|
| <b>PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)</b> |                                 |        |  |
| 1.   | Persyaratan                     | :      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Permohonan: Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan diterima oleh KPU Kabupaten Sintang paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan kegiatan;<ol style="list-style-type: none"><li>2. a. Dalam surat permohonan menyebutkan: Identitas pemohon meliputi nama perseorangan/ Institusi/ Lembaga Swadaya Masyarakat/ Organisasi Kemasyarakatan/ Partai Politik/ Badan Publik lainnya, kontak yang dapat dihubungi, dan alamat <i>e-mail</i>;</li><li>b. Surat Permohonan ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang.</li></ol></li></ol> |
| 2.   | Sistem, mekanisme, dan prosedur | :      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengajukan permohonan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan kepada Ketua KPU Kabupaten Sintang;</li><li>2. Ketua menugaskan Ketua dan/atau Anggota KPU Kabupaten Sintang untuk menindaklanjuti surat permohonan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan,</li></ol>   |

|  |  |    |  |
|--|--|----|--|
|  |  |    | Narasumber, dan Audiensi tentang kepemiluan;   |
|  |  | 3. | Sekretaris menyiapkan fasilitasi kegiatan sesuai dengan disposisi/arahan Ketua KPU Kabupaten Sintang;  |
|  |  | 4. | Telah disusun sistem, mekanisme, dan prosedur dalam SOP Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan.  |
| 3.   | Jangka Waktu Pelayanan                             | :  | Disesuaikan dengan kesepakatan antara pemohon layanan dengan KPU Kabupaten Sintang.  |
| 4.   | Biaya/Tarif  | :  | Tidak dikenakan biaya/tarif.   |
| 5.   | Produk Pelayanan                                   | :  | <p>1. Layanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan;</p> <p>2. Kurikulum Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang;</p> <p>3. Sertifikat Pendidikan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang.</p>  |
| 6.   | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi | :  | <p>Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat disampaikan melalui:</p> <p>1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran yang tersedia di PPID KPU Kabupaten Sintang pada hari pelayanan:</p> <p>a. Hari : Senin – Kamis<br/>Pukul : 08.00 – 16.00 WIB</p> <p>b. Hari : Jumat<br/>Pukul : 08.00 – 16.30 WIB</p> <p>2. Telepon : +62 851-1754-6501</p> <p>3. Whatsapp: +62 851-1754-6501</p> <p>4. Email : <a href="mailto:ppidkpusintang@gmail.com">ppidkpusintang@gmail.com</a></p> |
| <b>PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b> |  |    |  |
| 1.   | Dasar Hukum  | :  | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  |

|  |  |    |   |
|--|--|----|---|
|  |  |    | (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);   |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);   |
|  |  | 3. | Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);</p> <p>6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan</p> |
|--|--|---|

|  |  |     |  |
|--|--|-----|--|
|  |  |     | <p>Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);</p>  |
|  |  | 9.  | <p>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);</p> |
|  |  | 10. | <p>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum</p>  |

|    |                                 |     |  |
|----|---------------------------------|-----|--|
|    |                                 |     | Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);   |
|    |                                 | 11. | Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37).  |
| 2. | Sarana, Prasarana dan Fasilitas | :   | Sarana dan prasarana pertemuan/sosialisasi di kantor KPU Kabupaten Sintang, Kendaraan Dinas, Laptop/Komputer, Materi atau sejenisnya, Dokumentasi (alat perekam dan kamera) dan Alat Tulis Kantor, fasilitas untuk penyandang disabilitas.   |
| 3. | Kompetensi Pelaksanaan          | :   | Pendidikan kepemiluan dilaksanakan oleh personil yang berkompeten dibidang kepemiluan di lingkungan KPU Kabupaten Sintang.   |
| 4. | Pengawasan Internal             | :   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan dilakukan secara berjenjang;</li><li>2. Evaluasi pelaksanaan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.</li></ol>   |
| 5. | Jumlah Pelaksana                | :   | Maksimal 15 (lima belas) orang.  |
| 6. | Jaminan Pelayanan               | :   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Maklumat Pelayanan;</li><li>2. Kegiatan layanan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan;</li><li>3. Kegiatan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, maupun Audiensi Kepemiluan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan;</li><li>4. Kegiatan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, maupun Audiensi Kepemiluan difasilitasi oleh personal yang telah mendapat penugasan;</li></ol> |

|    |  |    |   |
|----|--|----|---|
|    |  | 5. | Materi dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan pemohon layanan.  |
| 7. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | :  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Terdapat Petugas Keamanan;</li><li>2. CCTV;</li><li>3. Alat Pemadam Kebakaran;</li><li>4. Jalur Evakuasi;</li><li>5. Titik Kumpul;</li><li>6. Kotak P3K;</li><li>7. Matrik Prosedur Keselamatan.</li></ol>   |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksanaan               | :  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Evaluasi internal dilakukan pada forum Rapat Pleno Rutin Ketua dan Anggota serta Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang dan/atau Rapat Struktural Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang;</li><li>2. Evaluasi pelayanan Pendidikan Kepemiluan melalui Survei Kepuasan Masyarakat.</li></ol> |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG,

ttd.

EDY SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

